

PERGULATAN ANTARA ISLAM DAN OTORITARIANISME DI SURIAH : SEBUAH PEMBELAJARAN

M. Fakhry Ghafur

*Peneliti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia*

Email: fachryghafur@gmail.com



Fenomena “*Arab Spring*” yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah pada tahun 2011 telah merubah peta kekuatan politik di kawasan. Satu persatu rezim otoriter berguguran seiring dengan semakin maraknya gerakan protes yang menuntut perubahan sosial, politik dan ekonomi. Pasca terjadinya “*Arab Spring*” dan bergugurannya sejumlah rezim otoriter, banyak kalangan memandang bahwa Timur Tengah akan menjadi kawasan demokratis yang besar. Salah satu faktor pendukungnya adalah runtuhnya “tembok” otoritarianisme yang sudah sejak lama membentengi sejumlah negara, serta

pengaruh gerakan protes yang dimotori oleh para pemuda yang menginginkan reformasi di segala bidang, khususnya tuntutan akan peran lebih masyarakat dalam kehidupan politik.

Pasca “*Arab Spring*” tuntutan akan demokratisasi dan peran *civil society* menjadi wacana yang mengemuka, terutama dalam konstelasi politik di Timur Tengah dan Dunia Islam saat ini. Hubungan agama dan politik di Timur Tengah pun menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan, hingga pada akhirnya menumbuhkan kecurigaan segelintir orang yang memandang perkembangan politik Islam dan kemajuan demokrasi di

Timur Tengah.

Dalam konteks historis, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta prinsip-prinsip bernegara yang dijalankan oleh *Khulafaurrasyidin* menunjukkan bahwa Islam sangat sesuai dengan prinsip politik demokrasi. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa dalam dinamika politik Timur Tengah saat ini sebenarnya "*Arab Exceptionalism*" lebih mengemuka dimana sistem politik otoriter dianggap sebagai penghambat perkembangan demokrasi di negara-negara Arab. Kegagalan demokrasi di Timur Tengah bukan karena ketidaksesuaian antara Islam dan demokrasi, tetapi sistem otoritarianisme yang sudah membudaya dalam kehidupan politik para pemimpin Arab.

Politik otoritarianisme di Timur Tengah mulai mengemuka pada era 1990-an, ketika sejumlah rezim mulai mencengkramkan kekuasaannya, seperti kasus pembubaran *Front Islamic Salvation* (FIS) oleh rezim militer di Aljazair serta partai Refah dalam pemilu Turki. Politik otoritarianisme bukan malah surut bahkan semakin memuncak, terutama setelah musim semi Arab yang dimulai dengan kembali berkuasanya rezim militer di sejumlah negara, seperti Mesir di bawah pimpinan Jenderal Abdul Fatah al-Sisi hingga masih bertahannya Bashar al-Assad di Suriah.

Dari sini muncul pertanyaan, mengapa sistem otoritarianisme di sejumlah negara Timur Tengah masih sedemikian kuat sehingga dapat mendominasi setiap sisi kehidupan sosial-politik di hampir

negara-negara Timur Tengah? Bagaimana peran kekuatan politik oposisi dalam dinamika politik Timur Tengah, khususnya di Suriah pasca terjadinya *Arab Spring*? Tulisan ini akan membedah secara lebih mendalam pertarungan antara politik Islam dan rezim otoritarianisme di Suriah yang semakin meningkat dalam dinamika politik Timur Tengah dewasa ini.

Politik Islam dan Otoritarianisme

Eva Bellin menyatakan, bahwa masih bertahannya rezim otoriter di sejumlah negara Timur Tengah tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain masih lemahnya peran masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara, manipulasi terhadap kekuatan oposisi dalam pemilu, sistem sosial-ekonomi yang masih dikendalikan oleh rezim, liberalisasi politik dan ekonomi tidak menyentuh masyarakat, serta masih adanya pembatasan lembaga-lembaga politik, seperti partai-partai dan organisasi masyarakat sipil.¹ Singkatnya, bahwa di beberapa negara Timur Tengah, dukungan internasional yang bernsinergis dengan kekuatan rezim militer untuk menekan kelompok oposisi, menyebabkan kuatnya rezim otoriter di Timur Tengah, seperti yang terjadi pada era 2000-an di mana rezim otokrasi Timur Tengah begitu kuat dan menguasai hampir mayoritas negara-

¹ Eva Bellin, "Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lesson from the Arab Spring", *Comparatif Politics*, Vol.44.No 2 (January 2012). 127-149.

negara Timur Tengah.

Otoritarianisme merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditandai dengan pusat kekuasaan yang kuat dan terbatasnya kebebasan berpolitik. Shorten mendeskripsikan sistem politik otoritarianisme dalam beberapa bentuk, diantaranya dimensi pluralisme politik yang kurang, seperti lembaga-lembaga politik yang berkembang, partai politik maupun kelompok yang berkepentingan.² Pemberangusan kelompok oposisi dan pemberontakan dilakukan sebagai legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itu, di sejumlah negara otoriter banyak dijumpai penindasan terhadap lawan politik dan aktivis anti rezim.

Dalam konteks politik, sistem pemerintahan yang otoriter adalah kekuasaan politik yang terkonsentrasi hanya pada satu pimpinan saja, sebagaimana yang terjadi di Libya pada era Qadafi, maupun Mesir masa kepemimpinan Husni Mubarak dan Saat ini di Suriah pimpinan Bashar al-Assad. Dari sini dapat dilihat, bahwa negara yang berdasarkan pada sistem otoritarianisme penekanan kekuasaannya hanya pada negara atau pribadi tertentu semata, tanpa adanya kebebasan ekspresi individu.

Selain menguatnya otoritarianisme, dalam beberapa dekade terakhir, demokrasi dan politik keagamaan merupakan isu penting yang banyak dikaji dalam studi politik Timur Tengah dan dunia Islam pada umumnya. Di sejumlah

negara, berbagai aktivitas politik Islam mulai menguat dan mencoba untuk mengaitkan politik demokrasi versi Islam pada sistem yang ada, baik di sebuah negara republik maupun monarki, dalam masyarakat yang homogen atau pluralis, dan di negara-negara kaya atau miskin. Karena itu, Huntington memprediksi realitas politik semacam ini akan terus terjadi, dimana kompatibilitas sistem politik dengan nilai-nilai agama dan budaya akan saling berhadapan.³

Hadirnya kekuatan politik agama pasca *Arab Spring* di sejumlah negara Timur Tengah merupakan respon dari sistem politik yang tidak demokratis. Ketidakmampuan rezim untuk mengelola demokrasi dan memecahkan masalah terkait kesejahteraan dan keadilan sosial-politik mendorong lahirnya kelompok oposisi yang menjadikan Islam sebagai dasar legitimasi dan politik identitas baik dalam sosial, politik, maupun ekonomi. Pasca runtuhnya sejumlah rezim otoriter, kelompok oposisi Islam lahir sebagai kekuatan politik yang berperan penting dalam arena politik di sejumlah negara, seperti *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, *Harokah Salafiyah* di Arab Saudi, maupun Revolusi Syiah Iran yang menjadi akar gerakan politik Syiah.

Pada titik ini kita dapat mengatakan, bahwa munculnya kekuatan politik Islam di Timur Tengah merupakan respon terhadap persoalan dalam kehidupan so-

2 Richard Shorten, *Modernism and Totalitarianism: Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present* (Palgrave Macmillan, 2012), 256.

3 Samuel P Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, Simon and Schuster Publisher, 1996.

sial umat Islam yang menjadi mayoritas. Politik Islam muncul sebagai antitesis dari rezim represif dan otoriter dalam negara-negara Muslim yang memanfaatkan Islam untuk memonopoli kekuasaan sehingga gagal untuk memberikan kebebasan beragama, kebebasan dari politik, kemakmuran ekonomi, pendidikan yang layak, dan hal-hal lain yang menjadi hak dasar bagi warga.

Antony Bubalo mengatakan bahwa kebangkitan Politik Islam berakar pada kesadaran politik masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam.⁴ Sementara itu, Dekmejian melihat bahwa fenomena politik Islam ditandai dengan penguatan aktivitas dan militansi keagamaan.⁵ Dalam hal ini, gerakan Islam muncul dalam beberapa perspektif, yaitu sebagai gerakan akomodatif yang memungkinkan partai-partai politik dan kelompok-kelompok Islam lainnya bergabung, baik gerakan Islam moderat maupun militan konservatif. Kelompok-kelompok ini memiliki kesadaran yang tinggi dalam memperjuangkan Islam walaupun aksinya kerap bersebrangan dengan pemerintah. Gerakan mereka bertujuan untuk mengubah sistem sosial, politik dan ekonomi ke arah kehidupan yang Islami.

Tulisan ini akan membahas tentang pergulatan politik antara kelompok Islam dan rezim otoritarianisme yang telah

berakar dalam tradisi politik dunia Arab, dengan fokus studi tentang konflik antara kelompok Islam dan rezim otoritarianisme di Suriah yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim militer di sejumlah negara saat ini, seperti di Libya, Mesir, Yaman, dan negara-negara lain dimana rezim despotik masih berpotensi untuk berkuasa.

Politik Otoritarianisme di Suriah: Konteks Sejarah

Suriah adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang sangat strategis hingga Ferdinand Von Richtofen-pakar studi Timur Tengah- menyebut Syiria sebagai jalur sutra di kawasan. Hal itu tidak lepas dari letaknya yang strategis, tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam budaya dan jalur militer global. Letak strategis ditambah kekayaan alam yang melimpah menjadikan Suriah sebagai negara yang dipersebutkan berbagai kekuatan politik regional dan global.

Sekitar 90% penduduk Suriah adalah etnis Arab, diikuti oleh 9% berasal dari Kurdi dan Armenia minoritas, Sirkasian dan Turkmenistan. Mayoritas penduduk Suriah merupakan Muslim (74%) yang bermazhab Ahlussunnah wal Jama'ah (Sunni), diikuti Syiah Alawiyah (12%), Druze (3%) dan sebagian sekte kecil Ismailiyah yang merupakan salah satu cabang aliran Syiah. Sementara orang-orang Kristen di Suriah men-

4 Antony Bubalo, *Middle East, Islamism dan Indonesia*, New South Wales : Low Institute for International Polic, 2005.

5 Dekmejian, *The Islamic Revival in the Middle East and North Africa*, *Current History*, April 1980. p.169.

capai 10% dari total penduduk.⁶

Keragaman etnis dan agama membuat Suriah sebagai negara rawan konflik, karena pengaruh kuat dari suku, sekte atau agama dalam budaya dan politik Suriah. Meski demikian, pengalaman politik Suriah yang sering didominasi oleh berbagai bangsa membuat Suriah sebagai negara dengan kesadaran tertinggi nasionalisme Arabnya dibanding negara Timur Tengah lainnya yang telah menghilang bersamaan dengan kolonialisme Barat.

Pasca perang dunia tahun 1946, Suriah mengambil kemerdekaan dari Perancis. Kemudian Suriah mencoba untuk membangun nasionalisme Arab melalui pendirian partai Baath oleh Michael Aflaq dan Salahuddin al-Bitar. Dengan prinsip *Al-Hurriyah* (kemerdekaan), *Al-Ittihadyyah* (kesatuan), dan *Al-Isytirakiyyah* (sosialisme), mereka mencoba untuk mewujudkan kemerdekaan dan kesatuan di dunia Arab, sebuah prinsip yang menjadi dasar dari ideologi berdirinya Republik Arab Suriah.⁷ Namun, pasca terbentuknya negara Republik Arab Suriah, Suriah tidak menjadi lebih stabil dalam kehidupan politiknya, bahkan banyak konflik dan kudeta militer terjadi. Era ini disebut sebagai persaingan antara Partai Baath dengan kelompok nasionalis sekuler dan sosialis. Pada masa ini, Salahuddin al-Bitar menjadi tokoh kunci dari kudeta militer 1963. Sejak

saat itu, negara di bawah kontrol rezim militer otoriter Suriah.⁸

Pada tahun 1966, Saleh Jadid melakukan kudeta terhadap rezim Al-Bitar yang merupakan pemimpin militer dari partai Baath. Pada era Jadid, kebijakan luar negeri Suriah lebih mendukung terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya Suriah dalam perang 1967 melawan Israel yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser. Meski kalah dalam perang, Suriah tetap memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok negara-negara yang memegang teguh nasionalisme Arab. Pada saat perang tahun 1967, Suriah harus kehilangan Dataran Tinggi Golan dan Mesir kehilangan wilayah Sinai.⁹

Sementara di dalam negeri, Salah Jadid mengambil langkah untuk transformasi politik dan ekonomi menuju sistem sosialisme yang mendapatkan perlawanan dari sebagian elit politik. Ada konflik internal antara Partai Baath yang lebih moderat dan kelompok-kelompok yang lebih radikal lainnya, yang pada akhirnya mendorong kudeta militer 1970 dibawah pimpinan Hafiz Al-Assad. Saat itu, kekuasaan Salih Jadid diambil alih oleh Hafiz al-Assad. Kebijakan politik Hafiz al-Assad pada saat itu, lebih memilih tokoh Sunni sebagai bagian dari pemerintah dan militer.¹⁰ Namun demikian, korupsi dan nepo-

6 Hinnebusch, Raymond, *Modern Syrian Politics*, Blackwell Publishing, 2007.

7 Lesch, David W, *Syrian Arab Republic*, (Colorado : Westview Press, 2011).

8 Saleh, Yasin Al-Haj, *The Political Culture of Modern Syria*, Conflict Studies Research Centre, Maret 2003.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.* Hinnebusch, *Modern Syrian Politics*.

tisme di kalangan keluarga al-Assad terus memicu perlawanan dari kelompok Sunni. Dukungan militer terhadap rezim Assad menjadikan politik rezim sangat kuat pada saat itu.

Pada Maret 1971, Hafiz al-Assad dilantik sebagai Presiden Suriah melalui referendum. Dia membangun sebuah rezim otoriter berdasarkan konsepnya sendiri. Assad berhasil mempertahankan kontrol atas sejumlah daerah yang berpotensi memicu terjadinya konflik politik dan kerusuhan. Ada sejumlah faktor yang mendorong Rezim Assad bisa bertahan, diantaranya adalah keberhasilan membangun stabilitas pemerintah, memanfaatkan dominasi Partai Baath, membangun struktur pemerintahan sosialis di bawah rezim militer, serta dukungan yang kuat dari para anggota sekte Alawi.¹¹ Akibatnya, di Suriah tidak ada kelompok oposisi. Siapa pun yang menentang Al-Assad, akan dibunuh dan diasingkan. Seperti, pembantaian para aktivis *Ikhwanul Muslimin* di kota Hama pada bulan Februari 1982 yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah. IM menentang sekularisme politik dan pengaruh kelompok Alawi terhadap negara.

Pasca kematian Hafiz al-Assad pada tahun 2000, tongkat estafet kepemimpinan beralih pada Bashar al-Assad. Pada masa kepemimpinan Bashar al-Assad, berbagai kelompok mendesak reformasi politik yang dapat menampung aspirasi masyarakat sipil di Suriah. Namun, kebi-

jakan pemerintah Assad tetap melarang kelompok oposisi. Pada 2005, kelompok oposisi melakukan perlawanan terhadap rezim al-Assad. Isu yang didengungkan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yaitu tegaknya reformasi politik. Atas desakan berbagai pihak rezim al-Assad pun melakukan upaya reformasi terbatas. Tapi, realitas yang terjadi reformasi hanya dilakukan pada sektor perekonomian.

Meskipun Assad telah menetapkan reformasi terbatas, rezim terus menekan kelompok oposisi, sehingga menimbulkan perlawanan dari kelompok oposisi, sehingga pada awal tahun 2010 ketika gelombang fenomena *Arab Spring* menimpa negara-negara Timur Tengah, Suriah menjadi negara yang terdampak. Gelombang Musim Semi Arab di Suriah dimulai dengan munculnya protes warga di Dara'a pada bulan Maret 2011 yang menuntut mundurnya Presiden al-Assad. Gerakan protes terhadap rezim al-Assad dibalas dengan kekerasan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Pada tanggal 6 Juni 2011 serangan yang dilakukan oleh pemberontak mengakibatkan kematian puluhan loyalis Assad di Jisr al-Shughur.¹² Insiden ini menunjukkan bahwa protes telah berubah menjadi konflik bersenjata yang dari waktu ke waktu semakin meluas. Selama tahun 2011 sampai saat ini telah terjadi beberapa kali pertempuran di beberapa daerah di Suriah.

12 Lihat, M. Fakhry Ghafur, *problematika Kekuatan Politik Islam dalam "Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah dan Aljazair*, M. Fakhry Ghafur (Ed.), (Bandung : Pustaka Jaya, 2016).

11 *Ibid.*

Berbagai langkah yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan sejumlah negara dalam mendesak rezim al-Assad mundur terbukti sia-sia. Liga Arab mendesak al-Assad untuk melaksanakan gencatan senjata dan reformasi di Suriah. Selain itu, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa mengancam akan menutup kedutaan besarnya di Damaskus dan memaksa al-Assad untuk mundur. Karena tekanan internasional, pemerintah al-Assad menetapkan kebijakan untuk membentuk konstitusi baru dan mengadakan pemilihan yang memungkinkan persaingan politik luar partai Baath. Melalui referendum mayoritas rakyat Suriah menyetujui konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilu, tetapi kebijakan pemerintah tidak memberikan partisipasi luas bagi rakyat sehingga bertrokan dan konflik masih berlangsung.

Ada beberapa faktor yang saling terkait antara meningkatnya konflik dan semakin menguatnya rezim di Suriah. *Pertama*, perpecahan dan sengketa yang ada dalam tubuh kelompok oposisi terutama pada Syirian National Coalition (SNC) menyebabkan terhambatnya upaya damai yang di dukung pihak internasional. Kelompok Islam SNC- Perpecahan itu tidak hanya terjadi di kalangan elit politik saja, tetapi juga pada tataran *grassroot*. Seperti halnya kelompok Free Syirian Army yang tidak ingin berkoordinasi dengan SNC karena mereka tidak mewakili aspirasi lapisan bawah. Meskipun demikian, SNC tetap mendapatkan dukungan dari AS, Uni Eropa, Turki dan beberapa negara Teluk.

Kedua, adanya konflik sektarian -meskipun tidak secara langsung- antara pendukung rezim dari kalangan Syiah Alawiyah dan Muslim Sunni mempersulit perubahan di Suriah dan kondisi ini akan menguntungkan rezim dalam mempertahankan kekuasaannya. Konflik sektarian di Suriah memang telah berlangsung sejak lama bahkan ketika rezim Hafiz al-Assad berkuasa. *Ketiga*, kepentingan politik negara-negara besar di belakang Suriah membuat konflik semakin lama. Sampai saat ini ada beberapa negara yang masih mendukung rezim Assad antara lain, Rusia, Cina dan Iran, bahkan sejak beberapa waktu lalu Turki mulai bergabung dengan blok Rusia untuk memberantas milisi kurdi dan ISIS.

Dalam konteks Suriah, Rusia adalah pemasok senjata terbesar ke Suriah, menurut Stockholm International Peace Research Institute, bahwa sepanjang tahun 2007-2011 Rusia memasok senjata lebih dari 72 persen ke Suriah mulai dari pesawat tempur, sistem pertahanan udara dan rudal.¹³ Meskipun tidak digunakan secara langsung dalam konflik, pasokan senjata dari Rusia meningkatkan kemampuan pertahanan Suriah, terutama untuk mempertahankan terhadap intervensi militer asing. Selain itu, dukungan Rusia juga tampak ketika Rusia kerap memveto rancangan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Awal Februari 2012, misalnya, Rusia menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat

¹³ Timeline of International Rspns to Syiria Conflict, Global Centre For The Responsibility to Protect, 2012.

dan negara-negara Barat.

Selain Rusia, Cina merupakan negara yang juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi di Suriah. Cina menganggap penting karena Suriah adalah salah satu eksportir minyak terkemuka Cina setelah Arab Saudi dan Iran. Suriah juga gerbang masuk pasar ekspor komoditas Cina ke seluruh wilayah Timur Tengah. Dukungan Cina terhadap rezim sangat signifikan. Terakhir, adanya konflik politik regional dan peran negara-negara seperti Iran, Israel dan negara-negara Arab di luar Suriah membantu memperburuk konflik disamping menguntungkan rezim untuk segera menguasai sejumlah wilayah dari pemberontak yang saat ini didukung Arab Saudi.¹⁴

Saat ini ada beberapa konflik yang bersinggungan dengan Suriah, konflik Palestina-Israel yang sudah terjadi sejak tahun 1948 sampai sekarang, konflik Hizbullah dan Israel di Lebanon selain konflik internal Lebanon, konflik separatis Houthi dan pemerintah Yaman serta Arab Saudi, dan isu-isu nuklir Iran yang menjadi persoalan yang berkepanjangan. Suriah dan Iran adalah dua negara yang menentang keberadaan Israel di Timur Tengah. Sementara itu, hubungan Suriah dan negara sekitar dalam beberapa dekade terasa tidak begitu harmonis. Suriah tidak hanya berkonfrontasi langsung dengan Israel atas kepemilikan

Dataran Tinggi Golan, tetapi juga memainkan peran penting dalam konflik antara Israel dan Lebanon dimana Iran dan Arab Saudi terlibat didalamnya. Jaringan kekuatan politik lokal yang berafiliasi dengan sejumlah negara membuat konflik Suriah semakin kompleks.

Dari uraian tentang kompleksitas konflik Suriah, dapat ditarik benang merah bahwa konflik tidak hanya masalah politik internal semata seperti keinginan rezim untuk bertahan, tetapi juga kepentingan kekuatan-kekuatan regional dan global di Suriah. Michael E. Brown, seorang ahli dalam ilmu politik dan hubungan internasional, George Washington University, menyatakan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh perilaku elit internal saja dalam mempertahankan status quo, tetapi mencakup banyak faktor dan kepentingan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵

Kepentingan sejumlah negara untuk terlibat di Suriah terlihat dari menguatnya otoritarianisme yang didukung poros Rusia, Cina, Iran, Hizbullah, Irak dan belakangan Turki. Dengan strategi dan rencana politik untuk terus mempertahankan rezim Assad dengan sistem sosialismenya. Di sisi lain, konflik Suriah juga dapat menjadi pertarungan blok AS dan negara-negara Barat baik secara politik dan ekonomi. AS dan negara-negara Barat telah mengambil sejumlah kebijakan untuk mempertahankan ceng-

14 Joseph Holiday, *The Assad Regime, from counterinsurgency, to Civil war*, Institute for Study of War, Washington, 2013. www.understandingwar.org.

15 Brown, Michael E, *Nationalism and Ethnic Conflict*, (New York : Mit Press, 2001).

keramannya di di Timur Tengah. Yaron Ezhari, seorang analis politik Timur Tengah mengatakan bahwa konflik Suriah memberikan ruang bagi AS dan negara-negara Barat untuk mengambil alih kendali politik yang saat ini dikuasai oleh Assad dengan dukungan blok Rusia. Pada titik ini kita dapat melihat bahwa konflik di Suriah tidak lagi sebagai sebuah masalah dalam negeri Suriah, tetapi telah menjadi persoalan global, seperti munculnya kekuatan politik baik secara regional dan global yang memiliki kepentingan di Suriah. Pada titik ini kita pun bisa melihat, ada kekuatan politik internasional yang ingin mempertahankan rezim otoriter di Suriah.

Politik Islam sebagai Lawan Otoritarianisme

Konflik di Suriah telah menyebabkan maraknya berbagai gerakan kelompok oposisi yang menentang rezim. Beberapa kelompok Islam yang berperan dalam politik dan menjadi penentang utama rezim Bashar al-Assad, diantaranya kelompok *Ikhwanul Muslimin*, Salafiyah dengan berbagai aliran, Al-Qaeda dengan berbagai faksi, serta sufi dan ulama yang juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial-politik Suriah.¹⁶

Di antara kekuatan politik Islam yang terlibat dalam dinamika politik dan konflik di Suriah adalah Ikhwanul Muslimin. IM dianggap sebagai gerakan perlawanan yang paling menonjol dan

kerap melakukan perlawanan terhadap rezim. IM merupakan organisasi Islam yang sudah lama ada di Suriah dan memiliki peran penting dalam politik Suriah modern, bahkan, dalam sebuah studi dari Pusat Studi Kebijakan Arab dan Timur Tengah, dijelaskan bahwa IM dinilai menjadi pemain kunci dalam politik kontemporer di Suriah saat ini, karena pengaruh dari IM sebagai gerakan Islam yang berakar cukup kuat di Suriah. Ada beberapa intelektual Muslim di Suriah yang memiliki kedekatan emosional dengan gerakan ini, seperti Syeikh ash-Shiba'i, Syeikh al-Bayouni dan Syeikh Said Hawa.¹⁷ Pemikiran mereka pada intinya merupakan penguatan atas hukum Islam dan menentang konstitusi sekuler di Suriah. Para ulama penentang rezim mengeluarkan fatwa bagi umat Islam untuk jihad melawan rezim al-Assad.

Pada tahun 1990, IM Suriah mulai melakukan langkah perubahan di bawah pimpinan Ali Sadruddin Al-Bayouni (1996-2010). Gerakan ini membuka diri terhadap kelompok Islam lain untuk bergabung melawan rezim al-Assad. Pada masa pemerintahan Bashar al-Assad, IM berperan dalam perubahan politik yang terjadi, dan merupakan pendorong munculnya fenomena *Damaskus Uprising* yang menuntut diakhirinya dominasi Partai Baath yang berkuasa, perubahan kekuasaan, dan liberalisasi politik.¹⁸

17 Abdurrahman Al-Haj, *Ad-Da'wah wal Jama'ah, At-Tathallu'at lil Jama'at Ad-Diniyyah fi Suriyah* (Al-Markaz Diniyyah fi Suria, (Al-Markaz At-Tawasul wa Abhats As-Stratijiyyah, 2012).

18 *Ibid.*

16 Abdurrahman Al-Haj, *Al-Ikhwan Al-Muslimun fi Suria*, (Dubai : Ad-Diraasat Al Mesbar), 2012.

Selain IM, Salafiyah adalah gerakan yang juga memainkan peran dalam politik Suriah. Pada awal terbentuknya negara Suriah, kehadiran Salafi di Suriah mengambil bentuk yang beragam dengan munculnya faksi-faksi bersenjata. Kemunculan gerakan Salafi di Suriah tidak dapat dipisahkan karena faktor eksternal maupun diskriminasi rezim yang didukung militer. Selain itu, sekularisme dan intervensi asing di Suriah telah mendorong semakin banyaknya para aktivis yang menentang kesewenang-wenangan rezim Al Assad. Di antara tokoh-tokoh Salafi yang muncul di Suriah adalah Jamal Al-Qasimi, Muhammad Rasyid Ridha, yang pindah dari Mesir ke Suriah, melalui karya monumentalnya yang berjudul Tafsir al-Manar telah memberikan inspirasi bagi kelompok-kelompok Islam di dunia, serta Muhammad Nasiruddin al-Albani yang sangat berpengaruh di Suriah.

Abdurrahman al-Haj mengelompokkan Salafi Suriah menjadi beberapa kelompok. Pertama, kelompok Salafi Jihadi yang mempunyai kedekatan dengan jaringan Al-Qaeda, seperti Jabhat al-Nushra, dan gerakan Al-Muhajirin. Kedua, kaum tradisional Salafi dengan semangat *Khilafah Islamiyyah*, termasuk Salafi Jihadi dan Salafi berorientasi Politik. Kelompok ini dekat dengan kedua faksi Islam Jabhat al-Nushra dan Harakat Al-Fajr. Ketiga, Salafi yang membentuk *Liwa Al-Islam*. Terakhir adalah kelompok Islam lain yang memiliki orientasi yang sama dengan Salafi, seperti

kelompok *Tauhid wal Faruq*.¹⁹

Di antara faksi Salafi, *Islamic Front* (IF) adalah gerakan Islam yang paling menonjol dan paling luas dukungannya. Gerakan ini didirikan pada bulan Juli 2012, yang terdiri dari beberapa sayap militer, antara lain, *Harakat Ahrar al-Sham*, *Harakat Al-Fajr Al-Islamiyyah*, *Liwa al-Haq* serta *At-Taliyah Jama'ah Al-Islamiyyah*. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menggulingkan rezim al-Assad dan membangun masyarakat Suriah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Dari titik ini kita bisa melihat, bahwa Front Islam memiliki tujuan dan ideologi yang berbeda dengan Al-Qaeda dan ISIS. Kelompok ini memiliki basis kekuatan di Aleppo, Edlib dan wilayah utara. Sementara fraksi lainnya Salafi, Liwa At-Tauhid fokus pada penyelesaian konflik dan misi kemanusiaan di beberapa daerah. Mundurnya kelompok oposisi Islam dari Aleppo menandai babak baru pertarungan antara rezim dan kelompok oposisi.²⁰

Faksi lain yang juga berpengaruh dalam politik Suriah adalah kelompok Front Islam untuk pembebasan Suriah (IFLS) yang memiliki kesadaran Islam yang dipengaruhi oleh IM dan tradisional Salafi. Sejumlah akademisi Muslim menganggap bahwa gerakan ini sebagai bentuk bagian dari kelompok Salafi. Gerakan ini tidak memiliki pengaruh yang

19 Abdurrahman Al-Haj, *Al-Ikhwan Al-Muslimun fi Suria*, (Dubai : Ad-Diraasat Al Mesbar), 2012.

20 *Ibid*.

signifikan dalam politik Suriah.²¹

Pada bulan November 2011, berdiri gerakan *Al-Ashalah wa At-Tanmiyyah* yang merupakan faksi tradisional dari kelompok Salafi. Gerakan ini memiliki dua sayap militer terkemuka yang berbasis di Deir Az-Zour dan memiliki cabang di hampir semua wilayah Suriah. Tujuan dari gerakan ini adalah penggulingan rezim al-Assad dan mempersatukan kelompok Islam di bawah bendera Islam. Munculnya berbagai faksi dalam tubuh Gerakan Salafiyah, menunjukkan tidak bersatunya kelompok politik Islam dalam satu gerakan dan aksi politik. Kesamaan mendasar antara semua faksi adalah sikapnya dalam membela Islam dan anti-rezim.

Sementara itu, reformis Salafi dibawah Jamaluddin Al-Qasimi dekat dengan kelompok Islam Moderat yang mendirikan NCSR dan dekat dengan Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini berbeda dengan Al-Qaeda dan gerakan Salafiyah lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi kelompok yang mapan dan berakar dalam kehidupan sosial-politik di Suriah.

Selain daripada itu, gerakan Sufi di Suriah telah menjadi gerakan yang menyebarkan perdamaian di Suriah melalui khutbah para ulama di sejumlah masjid dan madrasah (sekolah). Dalam beberapa dekade, kelompok Sufi di Suriah mulai aktif di ranah publik dan aktivitas sosial-politik. Diantara ulama Sufi yang secara aktif terlibat dalam

politik Suriah seperti Syekh Ahmad Kuftharo, Mohammad Said Ramadhan al-Buthi seorang ulama Sunni berpengaruh dan menjadi acuan dari sejumlah kelompok Islam.²² Al-Buthi tewas dalam serangan bom pada 21 Maret 2013. Berbagai karya al-Buthi seperti *Syarah al-Hikam* menjadi referensi umat Islam.

Memang, dalam kehidupan sosial-politik di Suriah, peran ulama tidak dapat dikesampingkan begitu saja, ulama adalah kekuatan politik yang berpengaruh di Suriah. Ulama sering menekankan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan rakyat Suriah. Serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial-politik di Suriah.

Dalam sejarah politik Suriah, para ulama adalah mereka yang menentang sekularisasi negara dan menuntut penerapan hukum Islam. Konstitusi di Suriah hasil amandemen tahun 2012 yang menyatakan bahwa presiden harus seorang Muslim dan Syariah Islam sebagai sumber hukum negara adalah hasil dari perjuangan para ulama yang telah lama berusaha untuk memperkuat Islam. Selama kepemimpinan partai Baath yang sekuler, ulama menjadi salah satu pilar yang mendukung perubahan di Suriah serta menjadi motivator dalam gerakan protes terhadap rezim Assad.

Para Ulama juga menjadi kekuatan pendorong yang mengubah dan mendorong setiap kelompok dalam

22 Lihat, Rumman, Mohammad Abu, *Islamists, Religion, and The Revolution in Syria*, (Jordania : FES Jordan Published, 2013).

21 *Ibid*

kehidupan sosial-politik di Suriah, tak terkecuali kelompok Sufi. Di antara kelompok Sufi yang memiliki ideologi yang sama dan strategi politik dengan kelompok lainnya, adalah kelompok *Harakat-Qabisat*, namun tidak memiliki pengaruh politik serta Zaidiyyah kelompok paling berpengaruh di Suriah. Kelompok ini terkenal dengan kegiatan Ar-Rifaiyyah yang mengacu pada pendiri Abdul Karim al-Rifai. Selama berabad-abad, kelompok ini telah menghindari konfrontasi langsung dengan berbagai kekuatan politik di Suriah dan lebih fokus pada aktivitas dakwah Islam dan pendidikan melalui ceramah dan seminar di sejumlah masjid. Kehadiran para ulama dengan berbagai aktivitasnya telah mewarnai dinamika sosial politik di Suriah.

Sementara itu, al-Qaeda adalah salah satu bagian dari aktor internal dalam konflik Suriah. Revolusi Suriah yang dimulai dengan aksi damai beralih menjadi perang sipil yang berkepanjangan. Rezim otoritarianisme telah memicu kekerasan di Suriah dan menimbulkan transformasi berbagai gerakan diantara kelompok-kelompok milisi, seperti al-Qaeda dan Salafi Jihadi. Selain itu, kekerasan juga memicu perang saudara, aktor regional dan internasional yang terlibat dalam konflik dan terbukanya daerah perbatasan menyebabkan lahirnya gerakan milisi bersenjata.

Gambar 1. Peta Konflik Suriah



Sumber : www.polgeognow.com

Pada April 2013, Negara Islam di Irak dan Suriah gerakan (ISIS) dibawah pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi berusaha untuk menggabungkan berbagai gerakan yang ada termasuk dengan Jabhat al-Nushra di Suriah dan menjadi bagian dari gerakan. Sejak itu, gerakan ISIS mengemuka. Pada awal 2014, ISIS mulai terlibat dalam konflik Suriah dan saat ini berhasil merebut kota Pylmira dari tangan rezim. ISIS menyerukan al-Qaeda dan semua kelompok Islam untuk bergabung. Bahkan, Ayman al-Zawahiri, salah satu pemimpin utama al-Qaeda secara eksplisit menyerukan semua kelompok bergabung dengan ISIS di Suriah. Sepak terjang ISIS pada akhirnya menjadi perdebatan antara faksi al-Qaeda dan menyebabkan pengunduran diri dari Jabhat al-Nushra dari barisan al-Qaeda. Jabhat al-Nushra lebih memilih untuk bergabung dengan faksi Islam lainnya dalam perlawanan terhadap rezim al-Assad daripada dengan ISIS yang mengedepankan kekerasan.

Lambat laun ISIS sukses menguasai sejumlah wilayah di Suriah, termasuk Ar-Raqqah pada bulan Agustus 2014 dan Kobane pada bulan Oktober 2014. Keberhasilan ISIS dalam menguasai sejumlah kota dan ladang minyak di Irak dan Suriah tidak dapat dipisahkan dari bergabungnya pejuang asing dari beberapa negara dalam satu kekuatan. Berdasarkan penelitian Reuters, sebagian besar anggota al-Qaeda mendukung aksi ISIS. Charles Lester, seorang peneliti di Brookings Institute mengklaim bahwa pasukan ISIS di Suriah mencapai 6.000 sampai 7.000 personel, sementara di Irak sebesar 5.000 sampai 6.000 personel sebagian besar berasal dari luar Suriah, mereka setia kepada pemimpin. Namun belakangan ini, karena kekerasan serta kerap melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perjuangan al-Qaeda, faksi Islam dan Dewan Syura Mujahidin mulai menarik dukungan untuk ISIS.

Ada beberapa faktor, baik internal maupun eksternal yang mendorong kehadiran kekuatan ISIS dalam konflik Suriah. Dalam konteks politik, gerakan protes yang menuntut reformasi politik dan ekonomi yang kerap diabaikan oleh rezim telah mendorong lahirnya gerakan radikal seperti ISIS. Masih bertahannya rezim dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat dan menunjukkan dominasi abadi rezim dalam politik Suriah. Sementara itu, di tingkat global, munculnya kekuatan asing telah menyebabkan konflik semakin memanas.

Negara-negara Barat dan AS sangat

mendukung Koalisi Dewan Nasional (NSC), yang tidak melibatkan sejumlah faksi Islam dalam sejumlah agenda di Suriah. Dalam hal ini dukungan finansial dan bantuan senjata menyebabkan semakin menguatnya kelompok kelompok ISIS, seperti halnya minoritas Kurdi dan Yazidiyyah di Utara Suriah. Selain itu, Amerika Serikat dan negara-negara Barat berusaha untuk mengalihkan agenda demokratisasi yang sebelumnya sering didengungkan melalui pertempuran langsung dengan ISIS. Sementara Arab Saudi dan Qatar memiliki agenda yang berbeda yang terus memberikan dukungan kepada kelompok oposisi Islam. Fenomena inilah yang pada akhirnya mengkristal sampai saat ini.

Suriah dalam Konstelasi Politik Dunia Pasca Arab Spring

Meluasnya konflik di Suriah mengakibatkan perhatian luas dari masyarakat internasional. Respon global terhadap konflik Suriah pada dasarnya dibangun di atas prinsip-prinsip perlindungan HAM dan menjaga rakyat sipil dari kekerasan yang semakin meluas. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga warganya dari kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk berpartisipasi dalam mempromosikan perdamaian dunia. Prinsip-prinsip perdamaian telah menjadi bagian dari masyarakat internasional, terutama setelah diselenggarakannya KTT PBB 2005 di New York. Jika suatu negara tidak lagi mampu melindungi warganya dari ke-

jahatan terhadap kemanusiaan, maka menjadi tanggung jawab masyarakat internasional untuk melakukan intervensi untuk melindungi warga sipil dari kejahatan rezim dan menghindari dampak penyebaran konflik.

Dalam kasus konflik Suriah, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai jalan damai baik di tingkat regional dan global. Di tingkat regional, sejak awal konflik sejumlah negara dan organisasi regional mengutuk pembantaian yang dilakukan terhadap warga sipil oleh rezim al-Assad. Atas desakan negara-negara Arab, pada 19 Desember 2012 Suriah menandatangani perjanjian perdamaian, menyetujui misi pengamat Arab di Suriah. Namun, Suriah menolak kebijakan Liga Arab untuk menyerahkan kepemimpinan dan membentuk pemerintah persatuan nasional. Rezim Assad menilai bahwa apa yang dilakukan Liga Arab merupakan bagian dari intervensi dalam urusan dalam negeri Suriah. Liga Arab akhirnya menetapkan sanksi yang lebih keras untuk Suriah untuk menarik utusan mereka serta mengusir duta besar Suriah. Misi perdamaian Liga Arab pada akhirnya terhambat oleh kepentingan beberapa negara anggota.

Sementara itu, pada level internasional, sejak awal meletusnya konflik, PBB telah melakukan berbagai cara untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Suriah. Sejak 2012, misalnya, PBB menunjuk sejumlah mediator, seperti Misi perdamaian dan pengawasan di Su-

riah (UNSMIS).²³ Namun, misi itu gagal setelah rezim Assad dan kubu oposisi menolak dialog, disamping tidak adanya kesepakatan antara negara-negara anggota PBB menjadi salah satu sebab terhambatnya proses negosiasi.

Upaya PBB untuk melanjutkan mediasi terus berjalan dengan mengangkat Lakhdar Brahimi sebagai pengganti Annan dalam misi perdamaian. Misi kedua ini tampaknya mengalami kegagalan yang sama setelah Lakhdar Brahimi mengundurkan diri dari jabatannya seiring tidak surutnya konflik di Suriah. Konflik tak berujung telah memaksa beberapa negara anggota yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah intervensi militer.

Beberapa anggota tetap seperti Amerika Serikat, Prancis dan Inggris mendukung pelaksanaan resolusi untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah dan menuntut Bashar al-Assad mengundurkan diri. Sementara itu, Rusia dan Cina memveto resolusi yang sering dianggap sebagai bagian dari intervensi berlebihan dalam urusan internal Suriah. Pecahnya suara di Dewan Keamanan PBB tidak lepas dari kepentingan sejumlah negara, baik secara politik maupun ekonomi. Kebuntuan dialog yang terjadi di tingkat regional dan global menyebabkan meningkatnya konflik di Suriah hingga saat ini.

23 Khaldoun Khashanah, *The Syrian Crisis : a Systemic Framework, Contemporary Arab Affairs*, Routledge, 2014, 7:1, p. 1-21.

Tragedi pembantaian rakyat sipil di Aleppo seharusnya dapat memaksa sejumlah negara untuk lebih tegas menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah despotik. Rusia merupakan aktor eksternal yang mendorong terjadinya agresi militer di sejumlah daerah, terutama di daerah yang dikuasai kelompok oposisi. Kebijakan Rusia untuk melakukan intervensi militer jelas menuai kecaman tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga masyarakat internasional pada umumnya. Seperti yang kita tahu bahwa Rusia terlibat dalam serangan di Aleppo belum lama ini.

Seharusnya dengan berkaca pada sejumlah kasus agresi militer di Irak dan Afghanistan, kekacauan akan semakin meluas. Intervensi militer tidak hanya akan berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan regional, tetapi juga pada upaya damai dan proses demokratisasi yang sedang berlangsung, selain melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Meskipun sebagian besar masyarakat internasional menolak intervensi militer, rezim Suriah yang di dukung blok Rusia, mengatakan akan terus melakukan serangan jika para pemberontak tidak mau menyerah. Upaya damai pun kembali dilakukan melalui dialog antara rezim dengan kelompok oposisi pasca dikuasainya Aleppo oleh pasukan rezim. Namun, upaya ini menuai tantangan setelah bergabungnya Turki dalam poros Rusia-Iran untuk memerangi ISIS dan separatist Kurdi.

Menurut hemat penulis, situasi politik di Suriah dapat berubah dan per-

damaian terwujud jika sejumlah aktor baik internal maupun eksternal dapat menahan diri demi terwujudnya perdamaian. Jika aktor eksternal tidak melepaskan dukungan untuk salah satu aktor yang terlibat dalam konflik internal, Suriah akan tetap menjalani medan konflik "proxy war" yang panjang. Tetapi, jika masing-masing negara yang terlibat dapat melepaskan dukungan untuk salah satu pihak, upaya rekonsiliasi politik besar kemungkinan akan terwujud.

Negara-negara yang tidak terlibat langsung dan berpengaruh seperti Indonesia dapat menjadi jembatan untuk solusi konflik politik di Suriah. Dengan kata lain, negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konfrontasi konflik Suriah bisa memainkan perannya melalui penyelesaian diplomatik politik. Karena itu, tidak ada alasan bagi negara manapun di dunia untuk melakukan agresi militer yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

Pertanyaannya adalah bagaimana akhir dari "Arab Spring" yang terjadi di Syiria? Apakah akan seperti Tunisia, di mana rezim akan runtuh karena tekanan dari pihak eksternal maupun internasional. "Arab Spring" sejatinya adalah panggilan bagi tegaknya demokrasi, maka jika memang apa yang terjadi di Suriah adalah murni karena untuk tegaknya demokrasi, maka persoalan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai penguasa hakiki, karena demokrasi sebagaimana yang diutarakan Abraham Lincoln adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka sudah semestinya

peran rakyat tidak dikesampingkan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan demi terciptanya perdamaian melalui partisipasi rakyat, salah satunya dengan memperhatikan kecenderungan tercapainya sistem konfesionalisme yang sekarang berlaku di Lebanon dan Irak, yaitu pembagian kekuasaan melalui jumlah mayoritas sekte yang ada di suatu negara. Hal ini dilakukan untuk menghindari konfrontasi politik setelah adanya peralihan kekuasaan di Suriah. Dengan demikian, rakyat akan mendapat partisipasi lebih dan bisa turut serta dalam proses demokratisasi di Suriah.

Meski demikian, perlu diperhatikan juga terkait upaya “backward bending” seperti yang terjadi di sejumlah negara, antara lain di Mesir maupun Yaman. Yaitu, upaya untuk mengembalikan kejayaan otoritarianisme di Timur Tengah. Ada kekhawatiran, jika Bashar al-Assad terus mempertahankan kekuasaannya akan terjadi perang kawasan. Nasib Suriah akan sama dengan apa yang terjadi di Irak maupun Afganistan yang porak poranda karena konflik. pemerintahan boneka akan muncul dalam konflik sektarian di Suriah.

Dari sini kita dapat melihat, bahwa pasca jatuhnya Saddam Hussein bentrok antara berbagai aktor yang mempunyai kepentingan tidak dapat dihindari, seperti halnya konflik yang pernah terjadi di Lebanon, bagaimana konflik sektarian menjadi bencana yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Ini adalah dilema politik dunia saat ini, konflik Suriah hanya akan menambah penderitaan rakyat sipil

tak berdosa karena kepentingan sejumlah aktor. Korban tewas akan terus bertambah, di sisi lain jika intervensi militer berlanjut akan lebih banyak korban dari kedua belah pihak dan dikhawatirkan akan menjadi perang dingin jilid tiga karena hadirnya aktor eksternal yang begitu signifikan dalam konflik.

Penutup

Sejak terjadinya gerakan protes pada awal Maret 2011, Suriah terseret dalam konflik yang tak berkesudahan. Berbagai kekuatan politik dan gerakan milisi bersenjata muncul dalam perang sipil di Suriah. Ratusan ribu orang menjadi korban dalam konflik terpanjang dalam sejarah Timur Tengah itu.

“Musibah” politik di Suriah mulai terjadi ketika rezim al-Assad mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer tahun 1973. Rezim al-Assad mulai membangun sistem politiknya berdasarkan ideologi nasionalisme Arab dan menguasai dua lembaga penting dalam politik Suriah, yaitu militer dan partai Baath. Domimasi sekte Alawiyah dalam tubuh partai Baath mendorong ketidakseimbangan kekuatan yang mengarah pada konflik antara rezim yang didukung Alawiyah dengan kelompok oposisi Sunni. Ikhwanul Muslimin, Salafiyah, Al-Qaeda dan faksi-faksi bersenjata lainnya muncul sebagai kekuatan politik yang menentang dominasi rezim al-Assad.

Ada beberapa faktor, baik internal maupun eksternal yang mendorong masih bertahannya konflik di Suriah. *Pertama,*

gerakan protes menuntut reformasi politik dan ekonomi kerap diabaikan oleh rezim. Pemilihan presiden yang diselenggarakan dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat dan menunjukkan dominasi abadi rezim politik di Suriah. Kedua, munculnya kekuatan asing telah menyebabkan konflik semakin mengkristal.

Negara-negara Barat sangat mendukung Koalisi Dewan Nasional (NSC) dan melibatkan sejumlah faksi Islam dalam agenda di Suriah. Dalam hal ini dukungan finansial dan bantuan senjata menyebabkan kelompok faksi lain, seperti minoritas Kurdi dan Yazidiyyah di Utara Suriah juga turut terseret. Selain itu, Amerika Serikat dan negara-negara Barat berusaha untuk mengalihkan agenda demokratisasi yang sebelumnya kerap didengungkan melalui konfrontasi militer dengan ISIS. Sementara Arab Saudi dan Qatar memiliki agenda yang berbeda dan terus memberikan dukungan kepada kelompok Islam.

Kelompok ISIS terus berusaha memperluas pengaruhnya di sejumlah wilayah yang dibebaskan atau dikendalikan oleh kelompok Islam. Kelompok ini menganggap militer Suriah dan kelompok-kelompok Islam lainnya yang tidak membaiai musuh yang menyerang faksi Islam lainnya untuk menghadapi ISIS. Di sisi lain, kelompok Salafiyah dengan berbagai faksi, baik Salafi Jihadis, politik dan tradisional memiliki agenda sendiri untuk menggulingkan rezim al-Assad dan mewujudkan pembentukan tatanan sosial Islam di Suriah. Munculnya berbagai kekuatan politik dinamika politik eksternal di Suriah membuat konflik Suriah semakin terinternasionalisasikan. Faktor kepentingan politik tidak hanya menjadi bagian dari misi aktor-aktor politik internal saja, tetapi juga eksternal dengan munculnya peran dan kepentingan baru di Suriah. []